DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, 2015. Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat)
- Erlina, 2015.Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013.Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ratno, Dwi. Mahfud, Sholihin. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Daerah Berbasis Akrual. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2007 .Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Keentrian Negara/Lembaga.
- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Saprudin, 2011 . "Analisis Pengaruh Upaya Pajak (Tax Effort), Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah di Kabupaten Indramayu Periode 1998-2008", Skripsi, FE Unpas, Bandung.

- Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Wiyono, Gendro. 2011. Merancang Penelitian Bisnis. Penerbit STIM YKPN. Yogyakarta.